

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Chomzah, Ali, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

-----2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Di Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Daliyo, J.B. 2001. *Hukum Agraria I*, PT.Prenhalindo, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harjati, Sri, 2005, *Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Universitas Airlangga, <http://www.journal.unair.ac.id>, di akses pada tanggal 1 September 2017.

Herlinda, Ema, 2004, *Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP Nomor 24/1997*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya (Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum CV. Ganda*. Yogyakarta.

Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kuswahyono, Imam dan Tunggul Anshari SN, 2000, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*, UM Press dan Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.

Murad, Rusmadi, 2013. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Mandar Maju : Bandung

Raharjo, Satjipto 1991, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Sarwata, 1987, *Hasil-Hasil Pertemuan Konsultasi Teknis Kepala Direktorat Agraria Propinsi Se Indonesia 28 Juli-1 Juli 1987 Di Jakarta*, Departemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sihombing, B.F., 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT. Gunung Agung, Tbk, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Soehadi, R, 1980, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Penerbit Karya Anda, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persado, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimeiri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soharto, Bohar 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Taristo, Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung. Alfa Beta.
- Sutrisno, L, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ter Haar Bzn, B, 1981, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ulis, Herma. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Pakai Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan, Hukum Bisnis*, Vol. 10, Jakarta.
- Zahari, Abdul Mulku, 1957, *Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Dalam Kerajaan Buton*, Data Naskah Arsip Nasional, Baadia.

### **Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton, Martabat Tujuh.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria

### **Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna  
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan  
Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan  
Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan  
Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas  
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam  
Kawasan Tertentu

Surat Keputusan (SK) Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 tentang  
Penetapan Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau.

Surat Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Buton tertanggal 21 Desember  
1974

### **Hasil Penelitian, Skripsi dan Tesis (Karya Ilmiah)**

Dini, Nalia Mutiara “Status Hukum Kepemilikan Atas Tanah *Turakia* Di Bekas  
Kesultanan Buton”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Salam, Safrin, “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah *Kadie* di Wilayah Kesultanan Buton”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

### **Kamus dan Arsip Negara**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,

Tim Redaksi Tatanusa, 1999, *Kamus Istilah Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*, Tatanusa, Jakarta,

### **Sumber Internet**

Yusri, Muhammad 2007, *Menelusuri Benteng Keraton Buton* [http:// www.Butonnews.blogspot.com](http://www.Butonnews.blogspot.com) , diakses pada tanggal 1 September 2017